



## Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Digital: Evaluasi terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung

Nadya Fatrah Balqis<sup>1</sup>, Citra Persada<sup>2</sup>, Dedy Yuliawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung, Indonesia, [nadyafbalqis@gmail.com](mailto:nadyafbalqis@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Indonesia, [citra.persada@eng.unila.ac.id](mailto:citra.persada@eng.unila.ac.id)

<sup>3</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia, [dedy.yuliawan@feb.unila.ac.id](mailto:dedy.yuliawan@feb.unila.ac.id)

Corresponding Author: [nadyafbalqis@gmail.com](mailto:nadyafbalqis@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Effective regional development planning requires active public participation to ensure that policies are inclusive, responsive, and sustainable. Along with the advancement of information technology, local governments are encouraged to implement digital-based planning systems that enhance transparency and public engagement. The Government of Lampung Province has developed the Spatial Planning Information System (SIMTARU) as part of e-government implementation in the field of spatial planning. However, the utilization of SIMTARU by the public remains relatively low and has not yet optimally enhanced public participation. This study aims to evaluate the extent to which SIMTARU contributes to increasing public participation in regional development planning, to identify factors influencing community involvement, and to formulate strategic recommendations for improving the effectiveness and inclusiveness of SIMTARU. This research employs a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative descriptive analyses. The analytical methods used include Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to examine the relationships among variables, as well as SWOT and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analyses to determine priority development strategies. The results indicate that system quality, information quality, and institutional support have a significant influence on SIMTARU utilization and public participation. Nevertheless, limited socialization, low digital literacy, and weak inter-institutional coordination remain key constraints. The priority strategies recommended include strengthening sustainable financing and technical support, enhancing the capacity of technical human resources, and fostering collaboration with universities and digital communities. This study is expected to contribute to the development of participatory and sustainable spatial information systems for regional development planning.*

**Keyword:** *public participation, regional development planning, spatial planning information system, SIMTARU, e-government*

**Abstrak:** Perencanaan pembangunan daerah yang efektif menuntut keterlibatan aktif masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan sistem perencanaan berbasis digital yang mampu mendorong transparansi dan partisipasi publik. Provinsi Lampung telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) sebagai bagian dari implementasi e-government dalam bidang penataan ruang. Namun, pemanfaatan SIMTARU oleh masyarakat masih tergolong rendah dan belum optimal dalam meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana SIMTARU berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta merumuskan strategi pengembangan SIMTARU yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan meliputi Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antarvariabel, serta analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan strategi prioritas pengembangan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan SIMTARU dan partisipasi publik. Namun, keterbatasan sosialisasi, literasi digital, serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Strategi prioritas yang direkomendasikan adalah penguatan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem informasi tata ruang yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** partisipasi publik, perencanaan pembangunan daerah, sistem informasi tata ruang, SIMTARU, e-government

---

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan. Dalam konteks pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan berfungsi tidak hanya sebagai pedoman alokasi sumber daya fisik, ekonomi, dan social, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menciptakan keseimbangan Pembangunan antarwilayah. Menurut Rustiadi (2021), perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh berbagai pendekatan, seperti perencanaan rasional, normative, dan partisipatif, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam merumuskan strategi pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, perencanaan Pembangunan diharapkan mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan yang berkelanjutan. Dalam era otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Keterlibatan masyarakat memungkinkan terjadinya proses identifikasi permasalahan secara partisipatif, perumusan solusi yang kontekstual, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain mencerminkan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, partisipasi masyarakat juga meningkatkan legitimasi sosial dan rasa memiliki terhadap hasil Pembangunan (Fauzi, 2016).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, konsep *e-government* berkembang sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Indrajit (2014) mendefinisikan *e-government* sebagai pemanfaatan

teknologi berbasis internet dan komunikais digital oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, penguatan *e-government* diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel (Wibowo & Suryadi, 2018). Salah satu implementasi *e-government* dalam konteks perencanaan pembangunan adalah pengelolaan informasi tata ruang berbasis digital.

Provinsi Lampung mmemilliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Dengan potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri, perencanaan pembangunan yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (BPS Lampung, 2023). Dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) sebagai sistem berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).

SIMTARU Provinsi Lapung dikembangkan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang secara transparan dan partisipatif. Sistem ini menyediakan akses informasi tata ruang, integrasi dengan perizinan, serta ruang komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang. Namun demikian, efektivitas SIMTARU dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung tahun 2022, hanya sekitar 23% pengguna SIMTARU berasal dari kelompok non-pemerintahan, sementara mayoritas pengguna berasal dari kalangan internal pemerintah dan konsultan perencana. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan SIMTARU sebagai sistem inkusif dengan realitas pemanfaatannya.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan daerah di Provinsi Lampung juga tercermin dari minimnya partisipasi dalam forum-forum perencanaan, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya literasi perencanaan dan digital masyarakat. Meskipun SIMTARU telah memiliki fondasi sistem digital yang memadai, implementasinya masih cenderung bersifat teknokratik dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi publik. Keterbatasan dalam aspek aksesibilitas, edukasi publik, interaktivitas sistem, serta koordinasi kelembagaan menyebabkan SIMTARU belum berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan evaluasi terhadap pemanfaatan SIMTARU dalam mendukung keterlibatan masyarakat pada perencanaan Pembangunan daerah. oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Digital: Evaluasi terhdap Pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Lampung”.

## **METODE**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan SIMTARU dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pperencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengolah, menafsirkan, dan memahami data agar dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan berguna dalam pengambilan keputusan. Analisis data melibatkan berbagai metode yang bergantung pada jenis data, tujuan penelitian, serta pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Teknik analisis data adalah suatu cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengolah, mengorganisir, menafsirkan, dan menarik Kesimpulan dari data yang dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Keterlibatan Masyarakat melalui SIMTARU

#### 1. Perumusan Hipotesis

**Tabel 1. Relevansi Penelitian Terdahulu**

N o	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Rahayu et al (2022)	Peran Pemanfaatan SIG dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan (Studi Kasus Surakarta)	Pemanfaatan SIG, Pengendalian Ruang, Partisipasi Masyarakat	Pemanfaatan SIG mempermudah pengendalian ruang dan meningkatkan keterlibatan masyarakat
2	Radliya et al. (2022)	Pengembangan SIG dengan Konsep Participatory GIS dalam Manajemen Tata Ruang Kabupaten Bandung	SIG Partisipatif, Partisipasi Publik	Menjadi dasar teoritis bahwa SIMTARU berpotensi meningkatkan partisipasi publik secara langsung
3	Hucadinota & Wijayanti (2019)	Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial Online untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Pemanfaatan Tata Ruang	SIG Online, Pengambilan Keputusan	Mendukung penggunaan SIMTARU sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah berbasis digital
4	Harahap & Harahap (2021)	Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pengambilan Keputusan Publik	Digitalisasi, Partisipasi Publik	Menjadi rujukan internasional bagi model partisipasi publik berbasis sitem informasi tata ruang

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal antara pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU), akses informasi tata ruang, dan partisipasi public dalam perencanaan Pembangunan daerah. hubungan kausal tersebut selanjutnya dirumuskan dalam hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Pemanfaatan SIMTARU berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung
- H2 : Pemanfaatan SIMTARU berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses informasi tata ruang masyarakat di Provinsi Lampung
- H3 : Akses informasi tata ruang berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung

- H4 : PemanfaatanSIMTARU berpengaruh tidak langsung terhadap partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah melalui akses informasi tata ruang

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan teknologi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi public dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hipotesis-hipotesis tersebut selanjutnya akan diuji secara empiris menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui besaran pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dalam metode penelitian.

## 2. Hasil Kuesioner Penelitian

**Tabel 2. Rekap Data Responden Kuesioner**

No	Nama	Asal	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	ZZ	Bandar Lampung	P	25	Mahasiswa
2	MJL	Pesisir Barat	P	35	ASN
3	RA	Metro	P	24	ASN
4	MFR	Lampung Tengah	P	26	ASN
5	AM	Bandar Lampung	P	24	ASN
6	MTA	Tulang Bawang Barat	P	24	ASN
7	HJ	Tulang Bawang Barat	P	24	ASN
8	WAS	Bandar Lampung	L	26	Mahasiswa
9	AA	Kotabumi	P	21	Konsultan
10	AA	Metro	P	28	Swasta
11	TBL	Kotabumi Lampung Utara	P	25	Wiraswasta
12	AM	Bandar Lampung	P	26	Dokter
13	ES	Tulang Bawang	P	34	PPPK
14	FN	Tulang Bawang	P	27	Swasta
15	LPW	Lampung Timur	P	31	Swasta
16	RP	Pringsewu	P	35	Wirausaha
17	SPP	Lampung Tengah	P	21	Mahasiswa
18	SS	Kota Bumi	P	28	Honorer
19	KW	Metro	P	24	Honorer
20	YP	tanggamus	P	32	swasta
21	TD	Sukabumi, bdl	P	26	Konsultan perencanaan
22	IN	Korpri, Bandar Lampung	P	37	PNS
23	KS	Bandar lampung	P	25	Tenaga kontrak
24	DPR	lampung tengah	P	28	PPPK
25	ARS	Teluk Betung Barat	P	27	Tenaga Ahli
26	NM	Lampung Selatan	P	28	PPPK
27	SS	bandar lampung	P	24	PNS
28	AMDS	Lampung barat	P	27	Konsultan
29	MAH	Bandar Lampung	L	27	Konsultan Individu
30	SK	Bandar Lampung	P	26	Konsultan Individu

Sebagai bagian dari pengumpulan data primer, penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data terkait persepsi dan pengalaman responden terhadap pemanfaatan SIMTARU Provinsi Lampung. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS), guna mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Adapun hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap seluruh butir pernyataan kuesioner disajikan dalam matriks berikut:

**Tabel 3. Matriks Partisipasi Masyarakat**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Temuan Data</b>	<b>Analisis</b>
<b>Akses Informasi</b>	Akses terhadap SIMTARU tanpa hambatan teknis	Mayoritas merasa cukup mudah, tapi 26% menyatakan kesulitan teknis	Sistem cukup informatif, namun masih perlu optimalisasi performa dan panduan penggunaan
<b>Pemahaman Peraturan</b>	SIMTARU membantu memahami regulasi tata ruang	Sebagian besar menyatakan “Setuju” atau “Netral”, sangat sedikit yang “Sangat Setuju”	Potensi edukatif tinggi, namun efektivitas penyampaian informasi masih terbatas
<b>Akses Informasi Pembangunan</b>	Kemudahan mendapatkan informasi pembangunan melalui SIMTARU	56% menyatakan “Setuju”	Fungsi informatif berjalan cukup baik, namun masih terbatas pada kalangan tertentu
<b>Mengurangi Konflik</b>	Peran SIMTARU dalam mengurangi konflik ruang	Sebagian besar responden “Netral” dan “Tidak Setuju”	Perlu penguatan fitur transparansi dan sosialisasi regulasi untuk peran preventif
<b>Keterbukaan Informasi</b>	Persepsi terhadap keterbukaan informasi melalui SIMTARU	Mayoritas responden “Netral” dan “Tidak Setuju”	Perlu peningkatan literasi dan relevansi konten yang disediakan
<b>Pemberian Masukan</b>	Masyarakat merasa dapat menyampaikan masukan	46% “Tidak Setuju” dan 20% “Netral”	Fitur partisipasi belum efektif atau tidak disosialisasikan dengan baik
<b>Didengar Pemerintah</b>	Respon terhadap masukan masyarakat melalui SIMTARU	67% “Tidak Setuju” dan “Netral”	Lemahnya umpan balik pemerintah menghambat partisipasi aktif
<b>Motivasi Berpartisipasi</b>	SIMTARU memotivasi masyarakat untuk ikut terlibat	43% “Tidak Setuju”, hanya 10% “Sangat Setuju”	Perlu pendekatan psikologis dan komunitas untuk meningkatkan rasa kepemilikan
<b>Interaksi Dua Arah</b>	Tersedianya fitur interaksi atau diskusi	Mayoritas responden “Netral” dan “Tidak Setuju”	Kurangnya fitur interaktif memperlemah ruang dialog dua arah
<b>Manfaat yang Dirasakan</b>	Informasi SIMTARU dirasa membantu masyarakat	43% “Setuju” dan 7% “Sangat Setuju”	Masyarakat mulai merasakan manfaat namun belum menyeluruh
<b>Komitmen Berkelanjutan</b>	Keinginan untuk terus menggunakan SIMTARU	50% menyatakan ingin terus menggunakan, sisanya masih ragu atau tidak	Masih ada keraguan, butuh peningkatan kualitas dan relevansi sistem

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

### 3. Uji Validitas

**Tabel 4. Uji Validitas Instrumen**

No	Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Ket
1	Sistem SIMTARU mudah digunakan oleh masyarakat	0,743	0,361	Valid
2	Tampilan antarmuka SIMTARU jelas dan menarik	0,751	0,361	Valid
3	SIMTARU dapat diakses dengan lancar	0,814	0,361	Valid
4	Menu dan fitur SIMTARU sesuai kebutuhan	0,792	0,361	Valid
5	Kecepatan akses SIMTARU memadai	0,744	0,361	Valid
6	Informasi SIMTARU akurat dan dapat dipercaya	0,627	0,361	Valid
7	Data SIMTARU diperbarui secara berkala	0,864	0,361	Valid
8	Informasi disajikan jelas dan mudah dipahami	0,662	0,361	Valid
9	Informasi sesuai kebutuhan masyarakat	0,794	0,361	Valid
10	Informasi relevan untuk perencanaan pembangunan	0,619	0,361	Valid
11	Pemerintah melakukan sosialisasi SIMTARU	0,627	0,361	Valid
12	Tersedia pendampingan penggunaan SIMTARU	0,809	0,361	Valid
13	Respons pemerintah terhadap masukan	0,775	0,361	Valid
14	Kebijakan pemerintah mendukung SIMTARU	0,867	0,361	Valid
15	Ketersediaan SDM dan teknologi	0,882	0,361	Valid
16	SIMTARU digunakan mencari informasi tata ruang	0,601	0,361	Valid
17	SIMTARU sebagai acuan pembangunan daerah	0,757	0,361	Valid
18	SIMTARU dimanfaatkan untuk memberi masukan	0,821	0,361	Valid
19	Penggunaan SIMTARU secara rutin	0,843	0,361	Valid
20	SIMTARU membantu pengambilan keputusan	0,822	0,361	Valid
21	SIMTARU meningkatkan kesadaran partisipasi	0,745	0,361	Valid

No	Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Ket
22	SIMTARU sebagai wadah aspirasi publik	0,843	0,361	Valid
23	Pendapat masyarakat diperhatikan	0,857	0,361	Valid
24	Dukungan terhadap platform digital	0,836	0,361	Valid
25	SIMTARU meningkatkan transparansi	0,724	0,361	Valid

#### 4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach’s Alpa. Dengan kriteria Cronbach’s Alpha > 0,60 → reliabel. Dengan jumlah pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 25 pertanyaan dann jumlah responden sebanyak 30 orang, maka nilai uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel Penelitian	Cronbach’s Alpha	Keterangan
Seluruh Item Kuesioner	0,968	Sangat Reliabel

#### 5. Analisis Regresi Jalur

$$\underline{X1, X2, X3} \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{Y}$$

Keterangan:

- 1) X1 (Kualitas Sistem)
- 2) X2 (Kualitas Informasi)
- 3) X3 (Dukungan Kelembagaan)
- 4) M (Pemanfaatan SIMTARU)
- 5) Y (Partisipasi Publik)

Dari diagram diatas arah panah dari X1, X2, X3 ke M menunjukkan pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan kelembagaan terhadap pemanfaatan SIMTARU. Panah dari M ke Y menunjukkan pengaruh langsung pemanfaatan SIMTARU terhadap partisipasi publik.

Berdasarkan hasil olahan data kuesioner masyarakat pengguna DIMTARU, dilakukan pengukuran terhadap lima variabel utama penelitian. Setiap variabel diukur menggunakan skala likert 1-5, dengan nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat persepsi masyarakat terhadap masing-masing aspek.

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Jalur**

Variabel	Dimensi Utama	Rata-rata (Skala Likert)	Interpretasi
<b>X1-Kualitas Sistem</b>	Kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kecepatan akses, kelancaran fitur	4.21	Tinggi – SIMTARU dinilai mudah digunakan dan responsif
<b>X2-Kualitas Informasi</b>	Akurasi, kejelasan, relevansi, pembaruan data	4.18	Tinggi – Informasi dinilai akurat dan relevan
<b>X3-Dukungan</b>	Sosialisasi, pendampingan,	3.97	Cukup Tinggi – Dukungan

Variabel	Dimensi Utama	Rata-rata (Skala Likert)	Interpretasi
Kelembagaan	respons keluhan, kebijakan, SDM		lembaga sudah baik namun belum optimal
M-Pemanfaatan SIMTARU	Penggunaan untuk informasi, acuan, dan masukan pembangunan	4.03	Tinggi – Masyarakat aktif menggunakan SIMTARU
Y-Partisipasi Publik	Kesadaran, aspirasi, keterlibatan, dukungan digital	4.15	Tinggi – Masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian positif terhadap penerapan SIMTARU Provinsi Lampung sebagai media pendukung partisipasi public dalam perencanaan Pembangunan daerah. dengan penjabaran tiap variable hasil dari analisis kalur adalah sebagai berikut:

- a. X1 : Hasil analisis regresi jalur menunjukkan bahwa variable Kualitas Sistem memiliki nilai rata-rata sebesar 4,21 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMTARU dinilai memiliki kinerja teknis yang baik oleh pengguna. Aspek kemudahan pengguna, tampilan antarmuka yang relative mudah dipahami, kecepatan akses, serta kelancaran fitur menjadi factor utama yang mendukung persepsi positif terhadap sistem.
- b. X2 : Variabel kualitas informasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,18 yang juga berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam SIMTARU dinilai akurat, relevan, dan cukup jelas oleh pengguna. Ketersediaan data tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan, serta adanya pembaruan data, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan SIMTARU sebagai sumber informasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas konten informasi menjasi salah satu kekuatan uatam SIMTARU dalam mendukung transparansi perencanaan ruang.
- c. X3 : Nilai rata-rata variable dukungan kelembagaan sebesar 3,977, yang termasuk dalam kategori cukup tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan dari instansipemerintah terkait seperti sosialisasi, pendampingan, kebijakan, dan penyediaan SDM telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa responden masih menilai bahwa intensitas sosialisasi, respons terhadap keluhan, serta koordinasi antarlembaga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dukunagan kelembagaan menjadi aspek yang masih memerlukan penguatan agar pemanfaatan SIMTARU dapat lebih merata dan berkelanjutan.
- d. M : Variabel pemanfaatan SIMTARU memiliki nilai rata-rata sebesar 4,03 yang berada pada kateogori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang telah mengenal SIMTARU cenderung aktif memanfaatkan sistem tersebut, baik untuk memperoleh informasi tata ruang, sebagai acuan dalam kegiatan Pembangunan, maupun untuk memberikan masukan terkait perencanaan. Tingginya nilai ini mengindikasikan bahwa Ketika SIMTARU telah diakses, sistem ini cukup fungsional dan relevan bagi kebutuhan pengguna.
- e. Y : Variabel partisipais public memperoleh nilai rata-rata 4,15 yang termasuk kedalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan SIMTARU merasa lebih sadar, terlibat, dan memiliki ruang

untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan Pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, nilai rata-rata dari kelima variabel menggambarkan bahwa SIMTARU telah memberikan kontribusi positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat menilai sistem ini berkualitas dari sisi teknis dan informasi, serta dimanfaatkan secara aktif. Namun, dukungan kelembagaan pemerintah masih menjadi faktor yang perlu diperkuat untuk memastsikan keberlanjutan dan perluasan partisipasi publik di masa mendatang.

**Tabel 7. Regresi Jalur Antar Variabel**

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur ( $\beta$ )	Sig.	Keterangan
X1 → M	0.321	0.000	Signifikan
X2 → M	0.275	0.001	Signifikan
X3 → M	0.298	0.002	Signifikan
M → Y	0.462	0.000	Signifikan
X1 → Y	0.125	0.041	Signifikan
X2 → Y	0.094	0.059	Tidak signifikan
X3 → Y	0.132	0.028	Signifikan

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa seluruh hubungan antarvariabel memiliki arah positif, yang berarti peningkatan antar variabel independen akan diikuti dengan peningkatan pada variabel dependen. Namun tingkat signifikannya berbeda-beda. Berikut hasil interpretasi dari hubungan antar variabel dalam penelitian ini:

- 1 Pengaruh Langsung
  - a. Kualitas Sistem (X1) berpengaruh langsung terhadap Pemanfaatan SIMTARU (M) sebesar 0,321. Artinya, semakin baik desain dan kecepatan sistem, semakin tinggi Tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.
  - b. Kualitas Informasi (X2) juga berpengaruh terhadap M sebesar 0.275, menunjukkan pentingnya keakuratan dan pembaruan data dalam menarik pengguna.
  - c. Dukungan Kelembagaan (X3) berpengaruh terhadap M sebesar 0.298, yang berarti kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemerintah mendorong masyarakat lebih aktif menggunakan SIMTARU
  - d. Pemanfaatan SIMTARU (M) memiliki pngaaruh langsung paling besar terhadap Partisipasi Publik (Y) sebesar 0.462, menunjukkan bahwa semakin sering masyarakat menggunakan sistem, semakin tinggi keterlibatan mereka dalam proses perencanaan.
- 2 Pengaruh Tidak Langsung
  - a. Pengaruh X1 terhadap Y melalui M =  $0.321 + 0.462 = 0.783$
  - b. Pengaruh X2 terhadap Y melalui M =  $0.276 + 0.462 = 0.737$
  - c. Pengaruh X3 terhadap Y melalui M =  $0.298 + 0.462 = 0.76$

Dengan demikian, kualitas sistem dan dukungan kelembagaan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil ini sejalan dengan Tachnology Acceptance Model (TAM), bahwa keberhasilan sistem informasi publik sangat bergantung

pada kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, SIMTARU memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan daerah.

## Identifikais Faktor Internal dan Eksternal

### 1. Analisis SWOT

**Tabel 8. Rekap Data Responden Wawancara**

No	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Surya Tri Esthi W H	34 tahun	Sarjana	Laki-laki	Dosen Planologi, ITERA
2	M. Arif Wibowo	30 tahun	Sarjana	Laki-laki	Operator SIMTARU
3	M. Okta Pura Nugraha	38 tahun	Sarjana	Laki-laki	Aparatur Sipil Negara PKPCK

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pemanfaatan SIMTARU dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor strategis yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama. Berikut ini adalah kondisi faktor internal dan eksternal dengan rincian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

#### 1) Faktor Internal

##### a. Strengths (Kuatan)

- i. Kesadaran masyarakat terhadap Pentingnya Tata Ruang Digital  
Factor ini merupakan kekuatan internal dalam pengembangan SIMTARU, ditunjukkan oleh meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keterbukaan informasi tata ruang dan dampak Pembangunan wilayah
- ii. Pemanfaatan Teknologi GIS dan Pemetaan Digital  
Penggunaan teknologi GIS dalam SIMTARU memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami tata ruang secara visual.
- iii. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang  
Dasar hukum seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Provinsi, serta kebijakan daerah mendukung keberadaan SIMTARU sebagai sarana transparansi public.

##### b. Weaknesses (Kelemahan)

- i. Rendahnya Literasi Ruang dan Digital Masyarakat  
Akademisi dan pemerintah sepakah bahwa Tingkat literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah, terutama di wilayah pedesaan hal ini menyebabkan rendahnya urgensi masyarakat untuk menggunakan SIMTARU sebagai alat aspirasi atau pengawasan tata ruang.
- ii. Keterbatasan Infrastruktur Digital  
Pemerintah mengakui adanya kendala teknis seperti keterbatasan bandwidth, perangkat server serta ketimpangan akses internet di beberapa wilayah. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses SIMTARU secara daring.
- iii. Keterbatasan SDM Teknis dan Anggaran  
Baik operator maupun akademisi menilai bahwa keberlanjutan SIMTARU bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi dan perencanaan spasial.

2) Faktor Eksternal

a. Opportunities (Peluang)

i. Tren Inovasi Pemetaan Partisipasi dan Digital Mapping

Perkembangan teknologi seperti mobile GIS, drone mapping, dan open data membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan SIMTARU yang lebih interaktif dan partisipatif.

ii. Dukungan Stakeholder (Masyarakat, Akademisi, Swasta)

Akademisi menilai adanya potensi kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan pihak swasta untuk memperluas kapasitas teknis serta riset inovatif dalam pengembangan sistem.

iii. Kolaborasi Lintas Lembaga

Hasil wawancara menunjukkan peluang besar bagi integrasi data antara pemerintah, universitas, dan sektir swasta. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas data spasial, dan memperkuat basis informasi tata ruang.

b. Threats (Ancaman)

i. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Institusi Pemerintahan

Pemerintah menyadari adanya potensi trusted isuee jika aspirasi masyarakat tidak direspon secara cepat dan tepat melalui sistem. Ketiadaan SOP dalam penanganan pengaduan dapat menyebabkan masyarakat skeptis terhadap efektivitas SIMTARU

ii. Konflik Kepentingan dan tekanan Politik dalam Perencanaan

Konflik kepentingan dan tekanan politik dalam perencanaan dapat menghambat objektivitas dan transparansi pengambilan keputusan.

iii. Hambatan Regulasi Lokal dan Birokrasi

Prosedur birokratis dan regulasi lokal yang belum sinkron dapat memperlambat proses validasi maupun penyabaran informasi dalam SIMTARU

iv. Ketidaklanjutan Dukungan Teknologi dan Platform Digital

Ancaman lain yang muncul adalah keberlanjutan dukungan teknis dan pembaruan sistem setelah berakhirnya proyek atau anggaran tahunan.

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal diidentifikasi kemudian faktor-faktor tersebut dimasukan pada matrik IFE (Internal Factor Evaluation) pada faktor internal dan matriks EFE (External Factor Evaluation) pada faktor eksternal. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan tersebut kemudian diberi bobot dan rating oleh para narasumber. Penentuan rating ditentukan oleh semua narasumber dalam penelitian ini yang kemudian total ratingnya di rata-ratakan. Penentuan bobot dan rating hasil kuesioner tercantum dalam lampiran yang terlampir dalam laporan penelitian ini. dari hasil data yang didapat mengenai matriks IFE dan matriks EFE maka dapat disajikan matriks internal faktor analisis (IFE) dan matriks eksternal faktor analisis (EFE) yang dapat disajikan sebagai berikut:

a. Matriks Internal Faktor Analisis (IFE)

**Tabel 9. Matriks IFE (Internal Factor Evaluation)**

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>				
1	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang digital	0,20	3	0,60
2	Pemanfaatan teknologi GIS/pemetaan digital mempermudah partisipasi publik	0,18	4	0,72
3	Dukungan regulasi dan kebijakan penataan ruang	0,15	3	0,45
Total Kekuatan		0,53		1,77
<b>Kelemahan</b>				
1	Rendahnya literasi ruang & digital masyarakat	0,17	2	0,34
2	Keterbatasan infrastruktur digital (akses internet, perangkat)	0,15	2	0,30

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
3	Keterbatasan anggaran & SDM teknis pemerintah	0,15	2	0,30
	Total Kelemahan	0,47		0,94
	Total	1,000		2,71

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel, yakni matriks IFE dalam analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor internal SIMTARU memiliki posisi internal yang cukup kuat. Artinya, meskipun masih ada keterbatasan SDM dan infrastruktur, potensi kekuatan seperti dukungan regulasi dan penerapan teknologi sudah mampu menjadi landasan penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam tata ruang.

b. Matriks Eksternal Faktor Analisis (IFE)

**Tabel 10. Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation)**

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang</b>				
1	Tren inovasi pemetaan partisipatif & digital mapping	0,20	4	0,80
2	Dukungan stakeholder (masyarakat, swasta, akademisi)	0,18	3	0,54
3	Kolaborasi lintas lembaga (pemerintah, kampus, swasta)	0,15	3	0,45
	Total Peluang	0,53		1,79
<b>Ancaman</b>				
1	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi/pemerintah	0,17	2	0,34
2	Konflik kepentingan & tekanan politik dalam perencanaan ruang	0,15	2	0,30
3	Hambatan regulasi lokal & birokrasi	0,08	2	0,16
4	Ketidaklanjutan dukungan teknologi platform	0,07	2	0,14
	Total Ancaman	0,47		0,94
	Total	1,000		2,73

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel, yaitu Matriks EFE dalam analisis SWOT menandakan bahwa faktor eksternal berada pada posisi cukup kuat, menunjukkan bahwa peluang eksternal (kolaborasi dan inovasi teknologi) lebih dominan dibanding ancaman. Hal ini menunjukkan lingkungan eksternal mendukung peningkatan partisipasi publik, asalkan dimanfaatkan kebijakan dan tata kelola yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap kondisi eksisting pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU), diperlukan pemetaan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan keberlanjutan sistem tersebut baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal mencerminkan kondisi yang berasal dari dalam sistem organisasi pengelolanya, yang meliputi aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal menggambarkan kondisi lingkungan di luar sistem yang dapat memengaruhi pemanfaatan SIMTARU, yang mencakup peluang dan ancaman. Identifikais faktor-faktor ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisis SIMTARU dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis tata ruang, yang selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk matriks swot pada tabel berikut.

**Tabel 11. Hasil Analisis SWOT**

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang digital	- Rendahnya literasi ruang dan digital masyarakat
- Pemanfaatan teknologi GIS/pemetaan digital mempermudah	- Keterbatasan infrastruktur digital (akses internet, dan perangkat)

partisipasi publik	- Keterbatasan anggaran dan SDM teknis pemerintah
- Dukungan regulasi dan kebijakan tata ruang	
<b>OPPORTIMITIES (Peluang)</b>	<b>THREATS (Ancaman)</b>
- Tren inovasi pemetaan partisipasi dan digital mapping	- ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah
- dukungan stakeholder (masyarakat, swasta, akademisi)	- konflik kepentingan dan tekanan politikan dapan perencanaan ruang
- kolaborasi lintas lembaga (pemerintahan, kampus, swasta)	- hambatan regulasi lokal dan birokrasi
	- ketidaklanjutan dukungan teknologi platform

Sumber: Hasil Olah Data Penliti, 2025

### Analisis Strategi Pengembangan SIMTARU Provinsi Lampung

Penentuan strategi untuk pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Lampung dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan analisis QSPM. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal guna merumuskan strategi yang tepat. Setelah strategi-strategi tersebut ditemukan, dilakukan analisis QSPM untuk menentukan prioritas strategi yang akan dilaksanakan. Penentuan prioritas ini didasarkan pada daya tarik strategi terhadap faktor internal dan eksternal.

#### 1. Analisis SWOT

Tabel 12. Matriks SWOT

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
	1.Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang digital 2.Pemanfaatan teknologi GIS/pemetaan digital mempermudah partisipasi publik 3.Dukungan regulasi dan kebijakan penataan ruang	1.Rendahnya literasi ruang & digital masyarakat 2.Keterbatasan infrastruktur digital (akses internet, perangkat) 3.Keterbatasan anggaran & SDM teknis pemerintah
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
1. Tren inovasi pemetaan partisipatif & digital mapping 2. Dukungan stakeholder (masyarakat, swasta, akademisi) 3. Kolaborasi lintas lembaga (pemerintah, kampus, swasta)	1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi GIS untuk memperluas partisipasi publik melalui fitur interaktif (S2-O1) 2. Memanfaatkan dukungan regulasi untuk mendorong kolaborasi lintas lembaga (S3-O3) 3. Menjadikan SIMTARU sebagai model percontohan tata ruang partisipatif berbasis digital (S1-O2)	1. Melibatkan akademisi dan komunitas digital dalam edukasi literasi ruang untuk masyarakat (W1-O2) 2. Mengembangkan kerja sama lintas lembaga untuk peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur (W3-O3) 3. Menggunakan inovasi pemetaan partisipatif berbasis mobile untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses (W2-O1)
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi/pemerintah 2. Konflik kepentingan & tekanan politik dalam perencanaan ruang 3. Hambatan regulasi lokal & birokrasi 4. Ketidaklanjutan dukungan teknologi platform	1. Meningkatkan transparansi sistem SIMTARU untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah (S2-T1) 2. Memanfaatkan dukungan kebijakan untuk mencegah intervensi politik dan konflik kepentingan (S3-T2) 3. Mengintegrasikan mekanisme respon publik dalam sistem SIMTARU untuk mengurangi risiko distrust (S1-T1)	1. Membuat SOP respon publik untuk mencegah menurunnya kepercayaan masyarakat (W1-T1) 2. Mengoptimalkan infrastruktur dan kolaborasi antar lembaga (W2-T3) 3. Menyusun regulasi turunan untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam penggunaan SIMTARU (W3-T3) 4. Menyusun strategi pembiayaan jangka panjang agar sistem tetap berjalan meski dukungan proyek berakhir (W3-T4)

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas didapatkan rekomendasi strategi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis menggunakan matriks SWOT.

## 2. Analisis QSPM

Tabel 13. Matriks QSPM

Faktor Utama	Bobot	Alternatif Strategi																										
		Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5		Strategi 6		Strategi 7		Strategi 8		Strategi 9		Strategi 10		Strategi 11		Strategi 12		Strategi 13		
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	
Kekuatan	A	0,1	3	0,3	4	0,4	4	0,4	3	0,3	3	0,393	3	0,393	3	0,3	4	0,524	4	0,4	3	0,393	4	0,524	3	0,393	4	0,524
	B	0,12	4	0,48	4	0,42	3	0,32	2	0,214	3	0,321	3	0,36	4	0,48	3	0,321	3	0,36	2	0,214	3	0,321	2	0,214	3	0,321
	C	0,13	3	0,32	4	0,52	3	0,39	3	0,321	3	0,39	3	0,321	4	0,429	4	0,52	4	0,429	4	0,429	4	0,429	3	0,39	4	0,52
Kelemahan	D	0,1	3	0,46	3	0,46	4	0,61	4	0,4	3	0,464	3	0,464	3	0,464	4	0,619	3	0,464	4	0,619	4	0,619	4	0,619	3	0,464
	E	0,1	2	0,35	4	0,71	3	0,53	2	0,357	4	0,4	4	0,4	2	0,357	2	0,357	3	0,536	3	0,536	4	0,4	4	0,714	3	0,536
	F	0,1	3	0,71	3	0,71	3	0,71	3	0,714	4	0,4	4	0,952	3	0,714	3	0,714	3	0,714	2	0,476	3	0,714	4	0,4	4	0,4
	G	0,08	4	0,32	3	0,25	2	0,16	3	0,25	3	0,25	4	0,32	4	0,333	3	0,25	4	0,333	2	0,167	3	0,25	2	0,167	4	0,333
	H	0,07	3	0,21	3	0,21	3	0,21	4	0,28	2	0,367	3	0,55	4	0,733	4	0,733	3	0,55	3	0,55	4	0,733	3	0,55	4	0,733
	I	0,07	2	0,26	4	0,28	3	0,4	3	0,4	4	0,28	4	0,533	2	0,267	3	0,4	4	0,533	4	0,28	4	0,533	3	0,21	3	0,21
	J	0,05	3	0,15	2	0,3	4	0,6	3	0,15	3	0,45	3	0,45	4	0,2	3	0,45	4	0,2	4	0,2	4	0,6	3	0,45	3	0,45
Ancaman	K	0,04	4	0,86	3	0,12	3	0,65	4	0,867	3	0,65	3	0,65	3	0,65	4	0,16	4	0,867	3	0,65	3	0,65	4	0,8	4	0,867
	L	0,02	4	0,6	4	0,6	2	0,3	3	0,45	4	0,6	3	0,45	3	0,45	3	0,45	3	0,45	4	0,6	3	0,45	4	0,6	3	0,45
	M	0,02	3	0,5	3	0,5	3	0,5	3	0,5	3	0,5	3	0,5	2	0,333	3	0,5	4	0,667	2	0,333	3	0,5	2	0,333	4	0,8
Total			6,45		6,72		6,1		6,85		7,05		6,3		6,55		6		6,4		6,2		6,65		6,5		7,2	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

**Keterangan Faktor Utama**

- Faktor A : Kesadaran masyarakat terhadap tata ruang digital
- Faktor B : Pemanfaatan teknologi GIS/ peta digital dalam SIMTARU
- Faktor C : Dukungan regulasi dan kebijakan penataan ruang
- Faktor D : Rendahnya literasi ruang & digital masyarakat
- Faktor E : Keterbatasan infrastruktur digital dan akses internet
- Faktor F : Keterbatasan SDM teknis dan anggaran
- Faktor G : Tren inovasi pemetaan partisipatif dan digital mapping
- Faktor H : Dukungan stakeholder (masyarakat, akademisi, swasta)
- Faktor I : Kolaborasi lintas lembaga (pemerintah-akademisi-swasta)
- Faktor J : Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah
- Faktor K : Konflik kepentingan dan tekanan politik
- Faktor L : Hambatan regulasi lokal & birokrasi
- Faktor M : Ketidaklanjutan dukungan teknologi/platform digital

**Keterangan Strategi:**

- Strategi 1 : Meningkatkan pemanfaatan teknologi GIS dan fitur interaktif SIMTARU untuk memperluas partisipasi publik
- Strategi 2 : Memanfaatkan dukungan regulasi dan kebijakan tata ruang untuk mendorong kolaborasi lintas lembaga (pemerintah, swasta, akademisi)
- Strategi 3 : Menjadikan SIMTARU sebagai platform partisipasi yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- Strategi 4 : Melibatkan perguruan tinggi dan komunitas digital dalam edukasi literasi ruang
- Strategi 5 : Meningkatkan kapasitas SDM teknis melalui pelatihan pemetaan partisipatif dan manajemen sistem informasi
- Strategi 6 : Mengembangkan kerja sama lintas lembaga untuk peningkatan infrastruktur digital dan keterjangkauan akses publik
- Strategi 7 : Mengintegrasikan mekanisme *feedback* publik dalam SIMTARU untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah
- Strategi 8 : Mengoptimalkan dukungan regulasi untuk mencegah konflik kepentingan dan intervensi politik dalam perencanaan ruang
- Strategi 9 : Memanfaatkan data spasial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola ruang yang transparan
- Strategi 10 : Menyusun SOP pelayanan publik digital yang jelas untuk menjaga kepercayaan masyarakat
- Strategi 11 : Mengoptimalkan infrastruktur dan kolaborasi antarlembaga
- Strategi 12 : Menyusun regulasi turunan yang mengurangi hambatan birokrasi dalam pengelolaan sistem
- Strategi 13 : Menyiapkan strategi pembiayaan dan dukungan teknis berkelanjutan agar SIMTARU tetap beroperasi pasca proyek

## 3. Strategi Pengembangan SIMTARU Provinsi Lampung

Tabel 14. Peringkat Alternatif Strategi Hasil QSPM

Ranking	Skor TAS	Alternatif Strategi
1	7,2	(Strategi 13) Menyiapkan strategi pembiayaan dan dukungan teknis berkelanjutan
2	7,05	(Strategi 5) Meningkatkan kapasitas SDM teknis melalui pelatihan
3	6,85	(Strategi 4) Melibatkan perguruan tinggi dan komunitas digital dalam edukasi literasi ruang
4	6,72	(Strategi 2) Memanfaatkan dukungan regulasi dan kebijakan tata ruang untuk mendorong kolaborasi lintas lembaga
5	6,65	(Strategi 11) Mengoptimalkan infrastruktur dan kolaborasi antarlembaga
6	6,55	(Strategi 7) Mengintegrasikan mekanisme feedback
7	6,5	(Strategi 12) Menyusun regulasi turunan yang mengurangi hambatan birokrasi
8	6,45	(Strategi 1) Meningkatkan pemanfaatan teknologi GIS dan fitur interaktif
9	6,4	(Strategi 9) Memanfaatkan data spasial untuk meningkatkan kepercayaan publik
10	6,3	(Strategi 6) Mengembangkan kerjasama lintas lembaga
11	6,2	(Strategi 10) Menyusun SOP pelayanan publik digital

Ranking	Skor TAS	Alternatif Strategi
12	6,1	(Strategi 3) Menjadikan SIMTARU sebagai platform partisipasi terbuka dan responsif
13	6	(Strategi 8) Mengoptimalkan dukungan regulasi untuk mencegah konflik kepentingan

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel diatas hasil perhitungan total TAS, nilai TAS tertinggi (7,05) menunjukkan bahwa strategi pembiayaan dan dukungan teknis berkelanjutan harus diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Strategi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendanaan dan dukungan teknis merupakan faktor paling strategis dan menjamin operasional dan pengembangan SIMTARU dalam jangka panjang. Hasil ini juga sejalan dengan temuan wawancara stakeholder yaitu pemerintah menilai perlunya pendanaan dan dukungan teknis dalam pengembangan sistem, sedangkan hasil wawancara akademisis menekankan pentingnya pendidikan tata ruang digital dan operator menyoroti potensi pengembangan fitur interaktif dan kolaborasi lintas sektor.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU ) Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan pembangunna daerah, mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya, serta Menyusun strtategi dan rekomendasi untuk pengembangannya secara lebih partisipatif dan inklusif. Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta pendekatan SWOT dan QSPM, diperoleh beberapa Kesimpulan penting sebagai berikut:

### 1. Tingkat Keterlibatan Masyarakat melalui SIMTARU

Hasil analisis regresi jalur menunjukkan bahwa SIMTARU telah menyediakan akses informasi tata ruang secara terbuka melalui berbagai fitur seperti peta tematik, regulasi tata ruang, permohonan legalisasi, pengaduan, serta forum partisipasi public. Namun, Tingkat pemanfaatan SIMTARU oleh masyarakat masih tergolong rendah. Mayoritas pengguna yang aktif masih berasal dari kalangan internal pemerintah dan pihak teknis seperti konsultan, sementara masyarakat umum belum banyak memanfaatkan platform ini sebagai media partisipatif. Rendahnya Tingkat pemanfaatan tersebut dipengaruhi ooleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta minimnya pemahaman public tentang pentingnya tata ruang dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Faktor Internal dan Eksternal Memengaruhi Efektivitas SIMTARU dalam Partisipasi Publik

Berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa SIMTARU memiliki kekuatan berupa ketersediaan data spasial yang komprehensif, teknologi GIS yang terintegrasi, serta dukungan regulasi tata ruang. Namun terdapat kelemahan seperti keterbatasan literasi pengguna, kurangnya interaktif, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum adanya sistem umpan balik yang responsif. Dari sisi eksternal, peluang berupa meningkatnya kebutuhan transparansi, perkembangan teknologi informasi, serta dorongan kebijakan SPBE menjadi faktor pendorong. Sementara itu, ancaman yang dihadapi mencakup rendahnya minat masyarakat, potensi resistensi dari kelompok tertentu, serta dinamika kebijakan tata ruang di tingkat daerah.

### 3. Strategi Prioritas Pengembangan SIMTARU

Melalui analisis QSPM, strategi prioritas yang efektif yaitu:

- Mengembangkan fitur pemetaan partisipatif berbasis GIS pada SIMTARU sebagai wadah kolaborasi masyarakat, akademisi, dan swasta dalam penyediaan data spasial

- b. Menjalinkan kerjasama formal dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk pengembangan sistem serta peningkatan kapasitas SDM dan literasi tata ruang digital
  - c. Meningkatkan transparansi penataan ruang melalui penyediaan data dan peta resmi yang terbuka dan terverifikasi di SIMTARU guna membangun kepercayaan publik
  - d. Menyusun dan menerapkan SOP serta roadmap pengelolaan SIMTARU untuk menjamin tata kelola yang kelas dan keberlanjutan sistem
- Strategi-strategi tersebut menjadi fondasi untuk menjadikan SIMTARU sebagai *platform digital digital* yang lebih inklusif, informing dan partisipatif.

## REFERENSI

- Arnstein, S.R. (1969). A ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bappeda Provinsi Lampung. (2024). Laporan Capaian Pemanfaatan SIMTARU Lampung. Bandar Lampung. <https://bappeda.lampungprov.go.id>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Despica, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Perencanaan Wilayah & Kota*, 9(1), 18-30. <https://media.neliti.com/media/publications/130949-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan.pdf>
- Farida, D. (2024). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang Bantaran Sungai. *Jurnal TEPAT Terkini*, 7(2), 400–412. [https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal\\_Tepat/article/view/548](https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal_Tepat/article/view/548)
- Gulo, A. A. J., & Abdiyanto. (2023). The Role of City Facilities in Encouraging Community Participation in Urban Planning in West Nias. *Proceedings of ICANEAT*. <https://ejournal.icpa-banyuwangi.ac.id/index.php/icaneat/view/296>
- Kartasmita, G. (1997). *Perencanaan Pembangunan: Teori & Praktik*. Jakarta: LP3ES.
- Minang, P. A., & Corbett, M. K. (2005). Assessing GIS for Community-Based Natural Resource Management. *The Geographical Journal*, 171(4), 340-358.
- Nugraha, I., Manan, M., Astuti, P., & Apriadin A. (2022). Participatory Mapping to Resolve Boundary Conflict in Riau, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 16(3), 257-268. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JURPS/article/view/9049>
- Pradana, S. A., Astuti, R. S., Ningsih, T. Y., & Afrizal, T. (2020). E-Participation in Semarang Smart City. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 123-136. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.03.6>
- Rambaldi, G., Chambers, R., McCall, M., & Fox, J. (2006). Participatory Spatial Information Management and Communication in Developing Countries. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1-11.
- Saputra, R. A. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi SIMTARU di Kabupaten Tulang Bawang (Skripsi, Universitas Lampung).
- Uun, A. (2023). Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Ruang Terbuka Publik: Studi di Tanjungbalai. *Jurnal Arsitektur & PWK Unsyiah*, 111(2), 205–217. [https://www.researchgate.net/publication/387325011\\_Kajian\\_Partisipasi\\_Masyarakat\\_dalam\\_Proses\\_Perencanaan\\_Ruang\\_Terbuka\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/387325011_Kajian_Partisipasi_Masyarakat_dalam_Proses_Perencanaan_Ruang_Terbuka_Publik)
- Yuliandri, A. (2021). Literasi Digital sebagai Kunci Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang. *Jurnal E-Government dan Kebijakan Publik*, 6(1), 65-78.
- Zulkarnain, A., & Ramli, H. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Informasi Tata Ruang Daerah: Studi Kasus Kota Makassar. *Jurnal Smart City dan Perencanaan Wilayah*, 4(1), 55-70